

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Rozali Abdullah. *Pelaksanaan otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Ahsan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ashiddiqie, Jimly. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- C.F.G. Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.
- Darmodiharjo, Darji dan Sidharta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Gie, The Liang. *Kumpulan Pembahasan terhadap Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Indonesia*. Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Supersukses, 1982.
- H.M Wahyudin Husein dan H. Hufron. *Hukum, Politik, dan Kepentingan*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2008.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985.
- Hanif, Nurcholis. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Haris, Syamsuddin. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Hasyimzoem, Yusnani. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo, 2017.

- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi*. Malang: Setara Press, 2015.
- _____. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press, 2015.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Ishak. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Kartika, Shanti Dewi. *Implementasi UU Desa: Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.
- Latif, Abdul dan H. Hasbi. *Politik Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Manan, Abdul. *Dinamika Politik Hukum di Indonesia* . Jakarta: Kencana, 2018.
- Manan, Bagir. *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya)*. Karawang: UNSIKA, 1993.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Moch Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2014.
- _____. *Penyelenggaraan pemerintahan Desa (Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press, 2012.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Sleman: Buku Mojok, 2022.

- Moh. Mahfud MD. *Konstitusi dan Hukum dalam Konversi Isu*. Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- _____. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cetakan Ke-4. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- _____. *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*. Jakarta : Pustaka LP3ES, 2006.
- _____. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, 2009.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Najih, Mokhammad, dan Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.
- Nasution, Mirza. *Politik Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Medan: Puspantara, 2015.
- Radjab, Dasril. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Rasjidi, Lili Rasjidi, Liza Sonia Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cetakan Ke-12. Bandung: PT Citra Aditya Bahkti, 2016.
- RM, Moch Wispandono, Nurul Imamah, dan Herry Yulistiyono. *Penguatan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Berbasis Pemecahan Masalah*. Sleman: Deepublish, 2022.
- Soemitro, Rohmat. *Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah dari Tahun 1945 s/d 1983*. Bandung: PT Eresco, 1983.
- Soemitro, Ronny Haniatjo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990.
- Suadi, Amran, Mardi Candra. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* . Jakarta: Kencana, 2016.
- Sumardjono, Maria SW. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: UGM Press, 2019.
- Triwidaryanto, Jaka. *Kinerja Pemerintahan Desa dan Demokrasi Desa*. Dalam Gunawan, Jamil. *Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*. Jakarta: LP3ES, 2005.

B. Artikel Ilmiah

- Amancik, Putra Perdana Ahmad Saifulloh, and Sovia Ivana Barus. "Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, no. 1 (2023): 63-80.
- Anggoro, Syahriza Alkohir. "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan". *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (2019):77-86. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2871>.
- Anwar, Khaeril. "Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal Ius* 3, no. 8 (2015).
- Ardhan, Sandy Mulia Arhdan. "Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi", *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2023): 167-178. <https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.8798>
- Astuti, Indri. "Politik Hukum Undang-undang Tindak Pidana Korupsi", *Forum Ilmu Sosial* 41, no. 2 (Desember 2014).
- Hamrin, dan Albert Tanjung. "Politik Hukum Pemekaran Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah". *National Journal of Law* 2, no. 1 (2020).
- Indrawan, P, F Wijaya, dan L Yuniarti. "Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemerintahan Desa". *Jurnal Tata Kelola dan Partisipasi Publik* 14, no. 2 (2023).
- Jaidun. "Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi". *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 1, no. 2 (2023): 197 – 205.
- Luthfy, Riza Multazam. "Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi", *Jurnal Masalah-masalah Hukum* 48, no.4 (2019). <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.319-330>
- Marzuki, Laica. "Membangun Undang-undang yang Ideal." *Jurnal Legislasi Indonesia* 4, no. 2 (Juni 2007): 1-8.
- Maulana, Thofil Fikri, Rosita Indrayanti, dan Ida Bagus Oka Ana. "Legal Politics and Constitutionality of Changes in the Term of Office of Village Heads", *Jurnal Justiciabelen* 7, no. 2 (2024).

- Nurudin, Nurudin, and Muh Rizal Hamdi. "Politik Hukum Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia." *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 4, no. 1 (2024): 85-104.
- Pariangu, TW, Umbu, La Ode Muhammad Elwan. "Ancaman Terhadap Demokratisasi Desa di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa." *Journal Publicuho* 6, no. 3 (2023): 851-866. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.213>
- Pratiwi, Fita Dwi. "Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara". *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023).
- Rahman, Muhammad Fauzan Fathur, dan Rizki Gunawan. "Urgensi dan Implikasi Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Dinamika Pemerintahan Desa di Indonesia", *Journal of Law* 3. No. 1 (2024).
- Roza, Darmini, and Laurensius Arliman. "Peran badan permusyawaratan desa di dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 3 (2017): 606-624. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>
- Suryohadiprojo, Sayidiman. "The Role of Village Government in Indonesia", *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 7, No. 2 (1971).
- Syamsu, Suhardiman. "Memahami Perkembangan Desa di Indonesia". *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2008).
- Vel, Jacqueline, and Adriaan W Bedner. "Decentralisation and Village Governance in Indonesia: the Return to the nagari and the 2014 Village Law". *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 47, no. 3 (2015).
- Wijayanto, Ronny, Sri Anggraini Kusuma Dewi, and Gesang Iswahyudi. "Pemerintahan Desa dalam Karakteristik Otonomi Desa di Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 365-374. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/issue/view/101>

C. Tesis

- Mandasari, Zayanti. "Politik Hukum Pemerintahan Desa (Studi Perkembangan Pemerintahan Desa di Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi)." Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2015.
- Mudatsir R, Ahmad. "Politik Hukum Hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang yang Mengatur tentang

Pemerintahan Desa Pasca Reformasi.” Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2017.

Yasin Al-Arif, Muhammad. “Problematisa Hukum Pengaturan Desa dalam Konstitusi (Analisis terhadap Pengaturan Desa Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD NRI 1945)”, Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.

D. Disertasi

MZ, Zen Zanibar. “Otonomi Desa dengan Acuan Khusus pada Desa di Provinsi Sumatera Selatan”. Disertasi, Universitas Indonesia, 2003.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1143).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 84, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2779).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 77 tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara 6914).

Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

F. Internet

Damarjati, Danu. "Isu Perpanjangan Jabatan Kepala Desa dicurigai Terkait Pemilu 2024". Diakses pada 12 Januari 2025. <https://news.detik.com/berita/d-6526097/isu-perpanjangan-jabatan-kepala-desa-dicurigai-terkait-pemilu-2024>

Dirgantara, Adhyasta, Diamanty Meiliana. "Kades Demo Di DPR Tuntut Masa Jabatan Jadi 9 Tahun, Ditemui Pimpinan DPR". Kompas.com. Diakses pada 09 Februari 2025. https://nasional.kompas.com/read/2023/01/17/11363921/kades-demo-di-dpr-tuntut-masa-jabatan-jadi-9-tahun-ditemui-pimpinan-dpr?lgm_method=google&google_btn=onetap

Farisa, Fitria Chusna. "Sinyal Bahaya Revisi UU Desa: Ancaman Korupsi hingga Transaksi Politik". Diakses pada 16 Januari 2025.

<https://nasional.kompas.com/read/2023/07/07/18320611/sinyal-bahaya-revisi-uu-des-a-ancaman-korupsi-hingga-transaksi-politik?page=all>

Hidayat, Rofiq. "PSHK: Perpanjangan Masa Jabatan Kades Potensi Korupsi Lebih Tinggi". Diakses pada 01 Januari 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pshk--perpanjangan-masa-jabatan-kades-potensi-korupsi-lebih-tinggi-lt63cfaf81a229c?page=1>

Indonesia Corruption Watch (ICW). "Sesat Pikir Perpanjangan Masa Jabatan Kades: Niat Buruk Politisasi Desa dan Suburkan Oligarki Desa". Diakses pada 01 Januari 2015. <https://antikorupsi.org/id/sesat-pikir-perpanjangan-masajabatan-kades-niat-buruk-politisasi-des-a-dan-suburkan-oligarki-des-a>

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

PSHK. "Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa: Kebobrokan Etik Kepemimpinan Publik". Diakses pada 12 Januari 2025. <https://pshk.or.id/publikasi/perpanjangan-masa-jabatan-kepala-des-a-kebobrokan-etik-kepemimpinan-publik/>

Salam, Hidayat. "Revisi UU Desa disahkan DPR Masa Jabatan Kepala Desa Jadi 8 Tahun". Kompas.com. diakses pada 01 Januari 2025. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/03/28/revisi-uu-des-a-disahkan-dpr-jabatan-kepala-des-a-jadi-delapan-tahunrevisi-uu-des-a-disahkan-dpr-masa-jabatan-kepala-des-a-jadi-delapan-tahun>

Santia, Tira. "*Demo Kades di Gedung DPR dan Polemik Masa Jabatan 9 Tahun*". Liputan6.com. Diakses pada 13 Februari 2025. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5188990/demo-kades-di-gedung-dpr-dan-polemik-masa-jabatan-9-tahun>

Sugito. "Transformasi Desa Menuju Desa Kuat, Maju, Mandiri, Demokratis dan Sejahtera". dipresentasikan dalam Seminar Nasional yang bertemakan Quo Vadis Desa Membedah UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU No. 6 Tahun 2016 tentang Desa pada 1 Agustus 2024.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 77 tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara 6914).